

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat era Donald Trump: Kajian mengenai Faktor Psikologis dalam *Free and Open Indo Pacific*

Arfin Sudirman, Windy Dermawan, Fairuz Nadhira Nur Salsabila
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Email: windy.dermawan@unpad.ac.id

ABSTRACT

The Indo-Pacific region is an area that connects the Indian and Pacific Oceans so that it has a strategic geopolitical and geo-economics' position. This region became the center of rapid growth, giving rise to a hierarchy for the United States as a great power country. This is demonstrated by the emergence of the Free and Open Indo-Pacific policy in the era of Donald Trump. This research aims to analyze psychological factors in US foreign policy under Donald Trump through the The Policy of Free and Open Indo-Pacific. This research uses the theory of leaders in foreign policy decision-making. This paper uses qualitative methods by collecting data through interviews with several informants and documentation studies. This research found that the Free and Open Indo-Pacific policy was considered more aggressive due to the influence of psychological factors from Donald Trump, ranging from idiosyncratic factors such as the nature and character of Donald Trump to external factors such as business background and relations between the United States and other countries.

Keywords: *Decision Making; Donald Trump; Foreign Policy; Free and Open Indo-Pacific; Idiosyncratic*

Pendahuluan

Dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu menarik perhatian publik internasional. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi negara hegemon setelah runtuhnya Uni Soviet. Terdapat dua landasan utama dari hegemoni Amerika Serikat, yaitu sifat konsumerisme global terhadap budaya pop Amerika Serikat, seperti musik, film, hingga lifestyle, dan upaya mempertahankan kekuatan militer global dalam pencapaian kepentingan nasionalnya termasuk sumberdaya alam seperti gas dan minyak bumi (Sotirović, 2019).

Salah satu kawasan yang dapat dianalisis sebagai implementasi dari dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kawasan Asia Pasifik. Sebelumnya, kawasan ini bukanlah fokus dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahkan jarang mendapatkan perhatian dari negara tersebut. Pasca Perang Dingin, fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat beralih ke kawasan Timur Tengah, dimana kawasan ini memiliki potensi sumberdaya mineral yang tinggi seperti gas dan minyak bumi (Sarhan, 2017). Pada perkembangannya, Amerika Serikat mulai menaruh perhatian terhadap kawasan Asia setelah melihat perkembangan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut (Wardhana & Dugis, 2019).

Salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia adalah *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Kebijakan ini bukanlah suatu kebijakan baru meskipun di era Donald Trump, kebijakan ini mendapatkan revitalisasi kembali sejak tahun 2017. Jika kita kaji awal kemunculan istilah FOIP, maka istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada forum *Quadrilateral Security Dialogue (QSD)* tahun 2007 untuk menyebut secara konstruktif wilayah Asia Pasifik. Di kawasan ini, Amerika Serikat menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan, senjata nuklir, ekonomi hingga *cybersecurity* (Kuo & Tang, 2015). Sebelumnya, nama Asia Pasifik dinilai sebagai istilah yang sering digunakan oleh RRC, sehingga Amerika Serikat serta negara-negara sekutunya mulai menggunakan istilah Indo-Pasifik sebagai penggantinya.

Konsep FOIP muncul pada tahun 2006 dari hasil pembahasan mengenai strategi kawasan antara Amerika Serikat, Jepang dan India. PM Jepang Shinzo Abe menunjuk istilah FOIP sebagai keinginan adanya kawasan yang berdasarkan kesamaan visi atas demokrasi, kebebasan dan saling menghargai terhadap Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2016, Abe kembali menegaskan kawasan Indo-Pasifik yang lebih spesifik dan lebih jelas pada *Tokyo international Conference on African Development (TICAD)*. Istilah Indo-Pasifik semakin valid setelah Amerika Serikat ikut serta menggunakan istilah ini dan mengeluarkan Kebijakan FOIP, dengan pendekatan ekonomi dan keamanan dalam kawasan tersebut di *Japan-U.S Summit* pada November 2017 (Rositter, 2018). Kawasan Indo-Pasifik ini secara lengkap meliputi kawasan Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, termasuk Daratan Benua Asia, dan Negara Asia lainnya seperti Jepang, Negara-Negara Asia Tenggara, India, Korea Selatan, hingga Benua Australia (Montratama, 2016). Dengan pertumbuhan yang massif dan posisi strategis dari Indo-Pasifik dari aspek ekonomi dan politik, maka kawasan ini menjadi arena bagi kekuatan-kekuatan baru dunia yang menarik perhatian negara-negara besar (Tertia & Perwita, 2018).

Penguatan kembali istilah FOIP di era Trump adalah semakin menguatnya sikap RRC di kawasan Indo-Pasifik sebagai negara hegemon. Pada tahun 2008, terjadi gelombang krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia, namun RRC sebagai salah satu negara yang minim terdampak negatif dari krisis moneter tersebut, ditambah euphoria RRC dengan penyelenggaraan Beijing Olympic yang menandakan keberhasilan modernisasi di RRC. Pada tahun 2010, RRC berhasil melampaui perekonomian Jepang dan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di Asia, serta terkuat kedua di dunia dengan peningkatan yang dimulai dari tahun 2008 (Arase, 2019). Dengan Perekonomian yang semakin kuat, pada tahun 2013, RRC mengeluarkan kebijakan luar negeri *Belt Road Initiative* di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Melalui kebijakan ini, RRC memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara di kawasan sekitar Eurasia hingga Afrika yang mau bekerjasama dengannya. Kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan pasar baru serta sumber impor bagi RRC (China, 2015).

Amerika Serikat yang melihat bahwa kebijakan *Belt Road Initiative* RRC dapat sangat menguntungkan terutama di kawasan Indo-Pasifik, sehingga Amerika Serikat mulai kembali mendekatkan diri dengan RRC, namun upaya tersebut tampaknya gagal. Hal tersebut mendorong Trump beserta negara-negara sekutunya, Jepang, Australia dan India mengeluarkan kebijakan FOIP sebagai kontra strategi bagi RRC (Arase, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan mengapa kebijakan FOIP ditekankan kembali di bawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dengan adanya perang ekonomi yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dengan RRC, apakah hal tersebut yang semata-mata mempengaruhi penekanan kembali atas

kebijakan FOIP atau adanya kepentingan bagi politik Amerika Serikat yang mendorong ditekankannya kembali kebijakan luar negeri tersebut. Hal ini yang membangkitkan curiositas peneliti untuk mengkaji lebih dalam.

Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan riset ini, diantaranya dari Siniver dan Featherstone (2020) yang menunjukkan pengaruh sifat dan karakteristik Trump melalui gaya kepemimpinan dan pandangan politiknya dalam kebijakan luar negeri. Ford (2020) menunjukkan bahwa konsep Indo-Pasifik era Donald Trump, termasuk kebijakan-kebijakan Amerika Serikat sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan kawasan Indo-Pasifik mulai dari membangun keamanan kolektif melalui sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut, kerjasama ekonomi, serta kerjasama politik. Arase (2019) menunjukkan bahwa era sebelum kebijakan Amerika Serikat terhadap Asia menjadi didominasi oleh strategi FOIP, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Asia terlalu fokus terhadap RRC, sehingga disebut sebagai *'China Engagement Era'*. Kai He dan Mingjiang Li (2020) menunjukkan bahwa Indo-Pasifik sebagai salah satu strategi kompetisi antara Amerika Serikat dengan RRC. Iriawan (2019) menunjukkan adanya perubahan dinamika politik di kawasan Indo-Pasifik setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menaruh kepentingan di kawasan tersebut yang sebelumnya mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari RRC.

Berdasarkan studi-studi terdahulu di atas, dapat dicermati bahwa kebijakan FOIP yang kembali dikeluarkan oleh Donald Trump di kawasan Asia-Pasifik hingga mengeluarkan suatu kebijakan FOIP ini masih terbatas kajiannya terutama mengenai faktor psikologis dengan level analisisnya aktor individu dari Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik melalui FOIP. Peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sifat, keyakinan, baik agama maupun politik, serta karakteristik Donald Trump yang turut ambil bagian dalam perumusan kebijakan FOIP. Tulisan ini juga menunjukkan pentingnya kajian mengenai dinamika Indo-Pasifik mengingat kawasan ini memiliki potensi yang besar baik bagi potensi pengembangan kerjasama maupun konflik. Tentunya dampak dinamika di kawasan Indo-Pasifik memberikan situasi bagi dinamika politik di dunia.

Metode

Riset ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk memahami proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai FOIP dengan mempertimbangkan faktor psikologis (idiosintratik) dari Donald Trump dalam pengambilan kebijakan mengenai FOIP. Melalui metode kualitatif juga, peneliti menganalisis aktor pembuat kebijakan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktor tersebut dengan jelas. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara semi stuktur, suatu wawancara yang bersifat fleksibel tetapi tetap memiliki struktur yang dapat dikontrol oleh peneliti (Lamont, 2015). Selain itu, peneliti melakukan riset berbasis internet dan riset berbasis dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang relevan. Untuk meyakinkan data yang digunakan peneliti adalah valid, maka peneliti melakukan validasi data melalui proses triangulasi data, yaitu peneliti membandingkan data-data dan informasi yang didapatkan, baik berdasarkan hasil wawancara maupun hasil studi dokumentasi.

Hasil dan Diskusi

Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik

Kerjasama di antara Amerika Serikat dengan kawasan Asia Pasifik sudah terjalin jauh sebelum Donald Trump ditetapkan menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Tentunya dengan kondisi kawasan Asia-Pasifik yang terus bertumbuh dinamika kerjasama di antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik juga terus berubah. Begitu pula dengan kebijakan Indo-Pasifik dan aliansi Quad yang terus berubah dan berevolusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh QSD meliputi latihan militer bersama di antara negara-negara anggota, hingga kerjasama keamanan lainnya. Namun karena ketidakjelasan tujuan dari QSD ini, ditambah statusnya yang informal banyak pihak yang beranggapan tujuan utama dibentuknya QSD sebagai kontra terhadap RRC dan pada akhirnya menjadi persekutuan keamanan yang dapat membahayakan keamanan internasional (White House Secretary, 2015). Para perkembangannya, Australia mengundurkan diri dari Quad karena tidak sejalan lagi dengan kepentingannya (Wyeth, 2017). Hal ini juga dipengaruhi oleh ketiga negara anggota QSD lainnya yaitu Jepang, India dan Amerika Serikat yang makin menunjukkan posisi strategis mereka sehingga Australia khawatir terganggunya hubungan ekonomi antara Australia dengan RRC (Envall, 2019).

Pada tahun 2012 di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *The Rebalance to Asia*. Kebijakan ini pada awalnya disebut sebagai kebijakan *"Pivot to Asia"* dimana adanya perpindahan atensi pemerintahan Amerika Serikat yang sebelumnya lebih besar terhadap konflik di kawasan Timur Tengah beralih hirauan ke kawasan Asia. Sedikit berbeda dengan kebijakan FOIP pada era sebelumnya, kali ini kebijakan Amerika Serikat tidak hanya berfokus terhadap keamanan melainkan juga faktor ekonomi serta diplomasi Amerika Serikat (Bush, 2016). Dalam melaksanakan kebijakan ini, Amerika Serikat memiliki enam pedoman yaitu memperkuat aliansi keamanan; mempererat hubungan kerjasama dengan *emerging power*, termasuk diantaranya adalah Cina; membangun hubungan baik dengan instansi-instansi multilateral dalam regional Asia Pasifik; mengembangkan perdagangan dan investasi; memperluas wilayah base militer serta mengembangkan demokrasi serta Hak Asasi Manusia (Cropsey, 2014).



Gambar Peta Kawasan Indo-Pasifik

Sumber: <https://theconversation.com/the-rise-of-the-indo-pacific-26271>

Namun dalam pelaksanaannya Kebijakan *The Rebalance to Asia* ini mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih signifikan dibandingkan dengan kebijakan FOIP pada masa Quad. Beberapa diantaranya adalah membuat Trans-Pacific Partnership (TPP), kerjasama perdagangan dan investasi antara Amerika Serikat dengan 11 negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, kerjasama perdagangan ini dinilai sebagai kerjasama perdagangan di dunia, menyumbang 40% dari perekonomian global. Melalui kebijakan *The Rebalance to Asia* ini, Amerika Serikat juga berhasil memperbaiki hubungan dengan RRC yang dianggap sebagai rival utamanya dalam hegemoni internasional (McBride, 2021).

Tahun 2017 ditandai sebagai tahun kembalinya Quad 2.0 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menggunakan istilah Indo-Pasifik dalam penyebutan kawasan Asia Pasifik. Hal ini merupakan salah satu langkah nyata Amerika mulai menampakkan persaingannya terhadap RRC. Walaupun hanya sebatas penggunaan istilah, Indo-Pasifik ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa Amerika Serikat ingin memunculkan hal-hal baru untuk mengontra RRC, bahkan pada penyebutan istilah suatu kawasan (Luthra, 2021; Fathun & Isnarti, 2021).

Quad 2.0 dan kebijakan FOIP pada masa pemerintahan Donald Trump ini memiliki tujuan dan struktur yang sama dengan Quad 1.0 pada tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya, kebijakan FOIP pada masa pemerintahan Donald Trump tampak lebih 'agresif' apabila dibandingkan dengan Quad 1.0. dan kebijakan di Indo-Pasifik yang sebelumnya. Di Quad 2.0, terlihat Amerika Serikat sangat menaruh perhatian dan aktif untuk ikut memelopori Quad 2.0 dan kebijakan FOIP, terutama dalam hal keamanan regional yang menempatkan RRC sebagai tantangan regional di Asia Pasifik (Luthra, 2021). Amerika Serikat juga dalam salah satu dokumennya dengan jelas menyatakan bahwa perkembangan RRC dalam membentuk hubungan dan pengaruh baru dalam kawasan Asia Pasifik merupakan sebuah tantangan nasional bagi Amerika Serikat.

Kebijakan FOIP pada masa Donald Trump memiliki agenda-agenda yang lebih terarah dan lebih kompak antarnegara anggotanya. Dari dibentuknya kembali Quad pada akhir tahun 2017, keempat negara anggota Quad secara rutin mengikuti

pertemuan antarnegara dan Latihan militer yang diselenggarakan. Hal ini berbeda dengan kerjasama antara negara-negara anggota sebelumnya yang mayoritas masih bersifat bilateral atau trilateral dan jarang secara sekaligus melibatkan keempat negara secara bersamaan.

Quad sebagai suatu aliansi sudah pasti memiliki tujuan kolektifnya namun Amerika Serikat sebagai anggota dari Quad pasti juga memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai di kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan FOIP ini. Menurut Amerika Serikat, kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat penting bagi apabila ingin mempertahankan kesejahteraan dan keamanan Amerika Serikat serta mengembangkan perekonomian Amerika Serikat secara regional maupun global. Amerika Serikat juga berharap dapat menyebarkan pengaruhnya serta memperkuat bahkan menambah negara-negara aliansinya di kawasan Indo-Pasifik, dan pastinya menahan perkembangan RRC dalam militer dan ekonomi serta pengaruhnya pada negara-negara di wilayah Indo-Pasifik.

Visi Amerika Serikat ini pun selaras dengan misi-misi yang tepat sasaran dibantu oleh negara-negara aliansi Amerika Serikat, terutama yang tergabung dalam Quad, yaitu Jepang, India dan Australia. Aksi-aksi yang diambil Amerika Serikat terhadap ancaman bagi negaranya serta negara-negara aliansinya juga lebih tegas menunjukkan bagaimana pemerintah Donald Trump lebih merasa penting untuk merespon ancaman-ancaman tersebut, seperti agresi ekonomi RRC atau isu nuklir dengan Korea Utara, apabila dibandingkan agenda-agenda Quad dan FOIP pada tahun 2007.

Tahun	Fenomena Indo-Pasifik oleh Amerika Serikat
era Kepemimpinan George Bush	
2004	Terbentuknya Tsunami Core Group oleh Australia-India-Jepang-Amerika Serikat
2007	Wakil Presiden Dick Cheney tertarik untuk bergabung kedalam Quad, pernyataan dalam pertemuan antara AS-Australia
Mei 2007	Pertemuan pertama QSD antara Australia-Jepang-AS-India
September 2007	Latihan militer Malabar oleh AUS-India-Jepang-AS-Singapura
2008	Australia keluar dari Quad, Shinzo Abe turun dari posisi PM, Quad vakum
era Kepemimpinan Barack Obama	
2011-2020	Masih ada Trilateral Meetings diantara AUS-Jepang-AS, India-Jepang-AS, AUS-India-Jepang, namun Quad masih vakum
2012	Shinzo Abe kembali menjadi PM Jepang, lahir Democratic Security Diamond
era Kepemimpinan Donald Trump	
2017	Quad Meeting di Manila yang menghasilkan kembalinya Quad 2.0
2019	Latihan militer Talisman Sabre antara AUS-Jepang-AS
September, 2019	Quad Meeting antara AUS-Jepang-India-AS
November, 2019	Latihan militer counter terorisme antara AUS-Jepang-

	India-AS
2020	Latihan militer Malabar

Tabel 1 Evolusi Quad dan kebijakan FOIP

Sumber: The Indo-Pacific Quest for the Quad's Spirit

Karir Politik Donald Trump

Donald trump merupakan tokoh yang lebih dikenal masyarakat internasional sebagai pebisnis ternama Amerika Serikat, sehingga tidak mengherankan bahwa banyak masyarakat umum yang menyangsikan saat Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada tahun 2017. Walaupun begitu, Donald Trump bukan merupakan orang baru dalam perpolitikan Amerika Serikat. Bahkan sebelumnya, Donald Trump sudah sempat mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2000 (Duignan, 2021).

Pada pemilihan presiden tahun 2016, Donald Trump mencalonkan diri menjadi presiden mewakili Partai Republik. Partai ini dikenal dengan pernyataan-pernyataan atau dukungannya terhadap gerakan konservatif. Partai Republik memiliki sejarah yang panjang dalam politik Amerika Serikat. Partai Republik berhasil memenangi beberapa pemilihan presiden Amerika Serikat, sejak dibentuknya pada tahun 1850. Namun saat ini, opini masyarakat terhadap Partai Republik tidak sebaik sebelumnya, salah satu survey yang dilakukan oleh *Pew Research Center* menyatakan bahwa kurang dari setengah responden memiliki opini yang buruk terhadap Partai Republik. Para pendukung partai ini kerap terlibat dalam perseteruan dengan pendukung Partai Demokrat. Sikap Partai Republik pun kerap dianggap terlalu konservatif di era modern ini. Hal tersebut yang kemudian saling memengaruhi, baik citra Partai Republik maupun citra Donald Trump di masyarakat umum (Pew Research Center, 2015). Meskipun Donald trump dikenal sebagai satu tokoh republikan dikarenakan kemenangannya pada pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu sebagai calon dari Partai Republik, dalam perjalanan karir politiknya Donald Trump tidak selalu menjadi anggota dari Partai Republik, bahkan Donald Trump lebih lama menjadi seorang demokrat dibandingkan sebagai anggota Partai Republik yang telah mengantarnya menjadi Presiiden Amerika Serikat (Gillin, 2015).

Selama karir politiknya, Donald Trump tercatat telah berganti keanggotaan partai politik sebanyak lima kali sejak pertama kalinya ia terdaftar sebagai anggota Partai Republik pada tahun 1987. Sejak awal masuknya Trump di dunia politik, dengan kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki, ia dapat mendatangkan pengaruh yang besar pula terhadap partai politiknya. Pada tahun 1987, setelah masuknya Trump di Partai Republik wilayah Manhattan, ia mengemukakan pendapatnya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bahwa Amerika seharusnya tidak lagi membiayai negara-negara untuk alasan keamanan apabila negara tersebut sebetulnya mampu membiayai dirinya sendiri. Argumentasi tersebut kemudian Trump publikasikan di tiga koran besar di Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung sudah menegaskan posisi Donald Trump dalam perpolitikan nasional meskipun masih terhitung sangat baru (Oreskes, 1987). Pada tahun 1999, Trump berpindah sisi menjadi anggota *reform party*, sebuah partai politik baru yang dibentuk pada tahun 1995. Setelah ia menjadi anggota partai. Politik tersebut pada tahun 2000, Donald Trump berencana untuk ikut serta dalam pemilihan presiden mewakili *Reform Party*. Namun pada akhirnya Trump mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada tahun tersebut (Gillin, 2015).

Setelah gagalnya pencalonan Donald Trump sebagai presiden pada tahun 1999, dia kembali berganti keanggotaan partai politik hingga beberapa kali, termasuk diantaranya menjadi anggota Partai Demokrat dari tahun 2001 hingga 2009. Banyak spekulasi yang beredar mengenai Trump kembali mengikuti pemilihan Presiden Amerika Serikat di hampir setiap eleksi, namun hal tersebut tidak dianggap serius oleh masyarakat pun dikarenakan pada saat itu Donald Trump terlihat fokus terhadap bisnisnya dan tidak begitu berkecimpung di dunia politik. Namun, Walaupun tidak mengikuti pemilihan presiden secara langsung bukan berarti Donald Trump tidak terlibat dalam pemilihan presiden sama sekali. Di beberapa pemilihan presiden Amerika Serikat, Donald Trump tercatat sebagai sponsor dari calon presiden tersebut, diantaranya adalah Mitt Romney pada tahun 2012 (Fox News, 2015)

Pada akhirnya spekulasi tersebut menjadi kenyataan pada saat Trump mengumumkan keikutsertaannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, di Trump Tower pada Juni 2015. Dalam pidatonya, Trump menekankan menangani masalah imigrasi ilegal, lapangan kerja di Amerika Serikat, hutang nasional dan terorisme. Kampanye Donald Trump ini juga memiliki slogan, yaitu "Make America Great Again", yang pada akhirnya mengantarkan ia menjadi presiden Amerika Serikat ke-46 (CSPAN, 2015).

Selama masa pemerintahannya Trump telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang mengundang perhatian masyarakat internasional, diantaranya adalah (cfr, 2021): 1. Keluarnya Amerika dari *Trans-Pacific Partnership* pada Januari 2017 yang sebelumnya merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama; 2. pada bulan yang sama, Januari 2017, Donald Trump juga mengeluarkan Travel Ban bagi warga negara beberapa negara mayoritas muslim yang ingin memasuki Amerika Serikat, kemudian Trump juga menyetujui kebijakan mengenai imigran hingga mengajukan anggaran dana pembangunan tembok pembatas antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk mengontrol imigran yang masuk ke Amerika, kebijakan ini pun sangat kontroversial dan menimbulkan penolakan dari masyarakat umum; 3. Pada April 2017 Trump meluncurkan serangan udara ke Siriayang kemudian menyebabkan Amerika Serikat dikecam oleh umat muslim diseluruh dunia, walaupun begitu setahun setelah penyerangan pertama, pada April 2018 Trump kembali meluncurkan serangan udara ke Siria untuk kedua kalinya; 4. Presiden Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang menerima undangan dan bertemu Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, pada tahun 2018, dan pada akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Korea Utara pada tahun 2019. Selain Kim Jong Un, Donald Trump juga berhasil bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada tahun 2017 di Jerman dalam rangka konferensi G20 dan Presiden RRC, Xi Jinping, pada tahun 2017. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengetahui ketiga negara memiliki hubungan yang tidak baik dengan Amerika Serikat.

Faktor Idiosinkratik dan Kognitif Donald Trump sebagai Aktor Pengambilan Kebijakan Amerika Serikat

Faktor Idiosinkratik pada pembuatan kebijakan merupakan faktor psikologis yang melekat pada diri seorang pembuat kebijakan. Faktor ini bersumber dari internal individu itu sendiri dan mempengaruhi pola pikir, cara pandang serta persepsi pada saat pengambilan keputusan (Anugrah, 2016). Donald Trump merupakan salah satu Presiden Amerika Serikat yang mengundang banyak perhatian dari masyarakat internasional. Sebagai seorang kepala negara, Trump diekspektasikan untuk bertindak, berperilaku dan mengambil keputusan sesuai dengan standard tertentu, namun Trump banyak dinilai oleh publik sebagai pribadi yang arogan bahkan narsistik. Hal tersebut terlihat sejak masa kampanye kemudian masa pemerintahannya hingga pada saat ia turun dari jabatannya sebagai presiden.

Selama masa kampanyenya, bukan merupakan hal yang jarang ditemui apabila Trump terlihat melontarkan beberapa pendapat yang kurang enak didengar terutama kepada kompetitornya, Hillary Clinton. Dalam salah satu debat pada masa kampanyenya, Donald Trump bahkan menyindir Hillary Clinton sebagai 'nasty woman' pada saat Clinton menjawab pertanyaan dari panelis (Diaz, 2016). Donald Trump juga secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka terhadap beberapa kelompok tertentu terutama imigran dan agama-agama minoritas, hal ini menyebabkan Donald Trump dilabeli sebagai seseorang yang rasis dan hanya menghargai pihak-pihak yang mendukungnya saja (Hayes, 2018). Bahkan saat Trump kemudian kalah di pemilihan Presiden berikutnya dia menuduh pemilihan presiden pada tahun 2020 lalu tidak jujur. Karena tuduhannya ini, pendukung Trump sampai membuat aksi protes di Capitol Hill, Washington DC, sebagai bentuk penolakan pengangkatan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang menggantikan Trump (Barry, Mcintire, & Rosenberg, 2021).

Trump gencar menggunakan sosial media sebagai sarana kampanye serta komunikasinya dengan pendukungnya, perbedaannya, pesan-pesan yang disampaikan melalui akun-akun media sosial Trump ini terkesan lebih informal, hal ini dikarenakan unggahan yang bersifat informal dan mengandung unsur emosional seperti intonasi sedih dan senang, memiliki nilai interaksi yang lebih tinggi, namun pernyataan-pernyataan yang muncul dari cuitan-cuitan di sosial medianya tidak jarang menarik perhatian masyarakat internasional (Tacente & Rus, 2019). Penggunaan media sosial ini tidak hanya masa kampanye saja, selama masa kepemimpinannya, Donald Trump tetap secara aktif menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi dengan pendukungnya serta media Donald Trump untuk mengkritik fenomena-fenomena internasional. Donald Trump memilih untuk menggunakan akun pribadinya @realDonaldTrump, secara tidak langsung hal tersebut memberikan kesan lebih personal terhadap eksistensi Donald Trump di sosial media (Tacente & Rus, 2019).

FOIP muncul kembali setelah opini publik Indo-Pasifik mengenai hegemoni Amerika Serikat yang menurun dan RRC yang makin gencar menyebar ideologinya di kawasan tersebut melalui kebijakan *Belt Initiative Road* era modern serta konflik Laut Cina Selatan. Amerika Serikat yang sangat bangga akan statusnya sebagai negara dengan *great power* di dunia merasa terancam dengan adanya power baru yang dapat berkembang dengan massif. Adanya rival dari hegemoni Amerika Serikat tentu bertolak

belakang dengan keinginan Donald Trump (Hunwick, 2019). Faktor idiosinkratik ini juga didukung oleh faktor kognitif atau faktor eksternal dari lingkungan Trump.

Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump merupakan pebisnis terkenal asal New York, dikarenakan latar belakangnya yang merupakan seorang pebisnis, jiwa bisnisnya menurun dari ayahnya, Fred Trump yang. Juga merupakan pengusaha besar pada tahun 1950-an, sejak masih remaja Donald Trump sudah mengikuti Fred Trump mengatur bisnis apartemen kompleksnya di berbagai wilayah di New York, pengalaman Donald Trump menemani ayahnya berbisnis ini yang membentuk karakter Donald Trump hingga menjadi salah satu pebisnis paling sukses di New York, bahkan Amerika Serikat (McAdams, 2018). Sebagai seorang pebisnis Donald Trump merupakan individu yang oportunist melihat kesempatan-kesempatan ekonomi dari segala arah, Trump juga merupakan individu yang sangat kompetitif hal ini dapat dilihat juga nantinya pada slogan kampanye Donald Trump yang sangat ambisius, *Make America Great Again* (McAdams, 2018). Sebagai seorang pengusaha, Trump juga merupakan negosiator yang handal, kemampuan yang sangat menguntungkan bagi seorang kepala negara (Jain, 2016).

Latar belakang Donald Trump, serta lingkungan pembuat kebijakan yang sangat erat kaitannya terhadap dunia bisnis banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Donald Trump. Dilihat dari salah satu tujuan dari kebijakan luar negeri masa Donald Trump adalah meningkatkan perekonomian Amerika Serikat, baik secara internal maupun eksternal. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Donald Trump merupakan salah satu aspek, disamping keamanan, yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Donald Trump, bahkan kebijakan yang diambil oleh Donald Trump di hari pertama ia masuk ke Gedung Putih adalah keluar dari TPP, kerjasama perdagangan yang mencakup 40% dari perdagangan dunia, dikarenakan TPP dinilai merugikan bagi perekonomian dan perdagangan Amerika Serikat.

Salah satu tantangan terbesar di perekonomian Amerika Serikat adalah adanya negara yang muncul sebagai rival dan berkembang dengan sangat cepat. Pada masa pemerintahan Donald Trump, sangat jelas bahwa Amerika Serikat dan RRC tidak memiliki hubungan bilateral yang baik. RRC selama beberapa dekade kebelakang mengalami perkembangan yang massif. Hal inilah yang dipandang oleh Amerika Serikat sebagai suatu ancaman. Hubungan di antara kedua negara baik maupun buruk sangat berdampak terhadap kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh masing masing, karena kebijakan luar negeri sendiri adalah suatu aksi dan reaksi yang saling mempengaruhi (Paquin, 2018).

Faktor Psikologis dalam Kebijakan FOIP

Sebagai salah satu aktor pembuat kebijakatrabn luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahannya, karakteristik Donald Trump mempengaruhi output dari kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terlebih apabila dilihat karakteristik Donald Trump ini sangat mempengaruhi gaya memimpinnya, walaupun didalam proses pembuatannya juga melibatkan banyak aktor lain. Pola kebijakan Donald Trump yang tidak terduga seperti menyiratkan bahwa Donald Trump tidak peduli dengan adanya

stigma masyarakat maupun opini-opini mainstream yang sudah terbentuk di kalangan para penstudi dan pengamat politik, contoh paling sederhana adalah hubungan Trump dengan beberapa kepala negara yang dikenal sebagai rival lama Amerika Serikat seperti Rusia. Hampir semua Presiden Amerika Serikat menganggap Rusia itu musuh atau rival namun Trump memiliki hubungan yang terbilang baik apabila dibandingkan dengan presiden-presiden Amerika Serikat yang sebelumnya, ini termasuk hal yang ingin diperlihatkan oleh Trump bahwa dia tidak mau berada di dalam identifikasi yang sama dengan presiden Amerika sebelumnya, dia tidak mau diprediksi oleh pers dan akademisi.

Hal ini juga dapat dilihat pada saat Donald Trump pertama kali diangkat sebagai presiden yang mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari berbagai kerjasama yang dibangun oleh rezim pemerintahan terdahulu termasuk diantaranya TPP, kebijakan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, walaupun kerjasama tersebut merupakan salah satu kerjasama ekonomi terbesar di dunia, kemudian kembali mengeluarkan kebijakan FOIP di akhir tahun 2017 setelah terlihat bahwa pengaruh Amerika Serikat mulai menurun di negara-negara Indo-Pasifik. Karakteristik Donald Trump yang memiliki kecenderungan narsistik dan kompetitif juga terlihat dalam ancaman dan tujuan dari kebijakan FOIP. Donald Trump sebagai individu selalu ingin menjadi yang terbaik, dipuji oleh semua orang dan tidak jarang memberi stigma negatif rival politiknya. Setelah ia menjadi Presiden Amerika Serikat, karakteristik tersebut juga terbawa ke dalam *leadership style* hingga kebijakan-kebijakannya. RRC merupakan ancaman terbesar bagi hegemoni Amerika Serikat.

Sentimen Donald Trump terhadap RRC juga terbawa ke media sosial Donald Trump. Donald Trump merupakan Presiden Amerika Serikat yang paling aktif dalam bermedia sosial, media sosial Donald Trump juga berbeda dengan Presiden-Presiden Amerika Serikat lainnya yang secara resmi dipegang oleh gedung putih, media sosialnya di atur oleh dirinya sendiri sehingga mayoritas cuitannya memiliki karakteristik Donald Trump sehingga terkesan lebih personal dan tidak resmi. Posisinya sebagai tokoh penting di Amerika Serikat, serta cuitannya yang bersifat personal ini tentu berdampak besar dalam menggiring opini publik terutama pengikutnya. Cuitannya sebagai Presiden Amerika Serikat juga dinilai terlalu eksplisit, dikarenakan isu-isu negara pada umumnya merupakan masalah yang terlalu formal untuk dibicarakan di ranah umum seperti media sosial oleh presiden-presiden sebelumnya, sedangkan Donald Trump bahkan tidak jarang melontarkan komentar-komentar tajam terhadap negara maupun pemimpin negara lain melalui tweetnya. Cuitan ini juga menggiring opini public terhadap RRC, mulai dari isu keamanan, ekonomi hingga yang paling terakhir menyebut corona virus sebagai china flu, dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga masyarakat bisa merasa lebih terhubung dengan opininya (BBC, 2021).

Sebagai seorang realist, Trump juga sangat mementingkan kekuatan militer dari Amerika Serikat terlihat dari biaya yang digelontorkan Trump untuk militer Amerika Serikat secara stabil selalu mengalami peningkatan selama masa kepemimpinannya, walaupun tidak setinggi rekor pada pemerintahan Obama (Giles, 2020). Di bawah pemerintahan Trump, Militer Amerika Serikat juga secara aktif mengikuti Latihan-latihan militer bersama dengan negara-negara sahabatnya, seperti latihan Angkatan

Laut Amerika Serikat dengan India, Australia dan Jepang pada tahun 2020 dan banyak latihan-latihan militer gabungan lainnya (AP, 2020).

Peningkatan anggaran militer Amerika Serikat serta makin gencarnya Amerika Serikat serta negara-negara aliansinya melaksanakan Latihan militer juga pastinya. Didorong dengan anggaran militer RRC yang selalu stabil meningkat setiap tahunnya. Anggaran militer RRC, menurut *Stockholm International Peace Research Institute*, melebihi anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah RRC, bahkan melebihi anggaran militer dari India, Rusia, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan digabungkan pada tahun 2019 (Funiole & Hart, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bagaimana karakteristik serta latar belakang Donald Trump mempengaruhi kebijakan FOIP, seperti sifat kompetitif, enigmatik dan kecenderungan narsistik dari Donald Trump terlihat dalam karakteristik kebijakan FOIP yang lebih agresif, Donald Trump juga lebih aktif dalam kebijakan-kebijakan di kawasan Asia Pasifik dan dalam melakukan counter terhadap power RRC apabila dibandingkan dengan presiden maupun kebijakan Indo-Pasifik sebelumnya.

Simpulan

Riset ini menemukan bahwa kebijakan FOIP era pemerintahan Donald Trump memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan kebijakan era pemerintahan sebelumnya sebelumnya, yaitu George Bush dan Barack Obama. FOIP di bawah pemerintahan Bush bersifat kurang terarah dan tidak efektif, sehingga pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan awal dari dibentuknya QSD dan kawasan Indo-Pasifik. Hal ini diduga terjadi karena pada saat itu Amerika Serikat lebih fokus terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah, imbas dari peristiwa 9/11, juga karena adanya krisis ekonomi dan kondisi internal di QSD yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2009. Di bawah pemerintahan Barack Obama, Quad serta Indo-Pasifik belum juga pulih. Barack Obama lebih memilih pendekatan yang lebih kondusif terhadap fenomena *The Rise of China*, Amerika Serikat berhasil membentuk kerjasama-kerjasama dengan RRC, akibatnya hubungan antara RRC dan Amerika Serikat pada masa Barack Obama membaik. Pada masa pemerintahan Donald Trump inilah, Quad 2.0 kembali dan kebijakan FOIP dibentuk. Pada masa Donald Trump, hubungan antara RRC dengan Amerika Serikat kembali memburuk, Donald Trump melihat fenomena *The Rise of China* sebagai ancaman bagi Amerika Serikat baik dari aspek militer maupun ekonomi.

Riset ini juga menemukan bahwa faktor psikologis Donald Trump berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan FOIP pada masa Quad 2.0, dan mengapa kebijakan ini lebih agresif apabila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Donald Trump yang merupakan seorang pebisnis membuat Donald Trump menjadi individu yang kompetitif, Donald Trump selalu ingin memproyeksikan pertumbuhan politik internasionalnya ke dunia, sehingga pertumbuhan pesat RRC merupakan ancaman besar bagi hegemoni Amerika Serikat yang sudah dipertahankan selama bertahun-tahun.

Donald Trump juga memiliki karakteristik yang sulit diprediksi, Trump tidak pernah masuk dalam stereotip seorang presiden Amerika Serikat jika dilihat dari gaya kepemimpinan, cara bicara hingga perilakunya di media sosial. Hal ini yang kemudian menciptakan personal Donald Trump yang lebih agresif dalam mengambil keputusan dan tidak takut dengan negara lainnya dalam memberikan pernyataan. Tidak jarang

Trump melontarkan pernyataan-pernyataan yang secara eksplisit menyinggung negara lain dalam pidatonya juga cuitannya di media sosial.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kognitif atau faktor eksternal yang paling mendorong dari perilaku Trump, serta keputusan Quad dan Kebijakan FOIP adalah *The Rise of China*, dimana pertumbuhan pesat negara RRC yang dimaknai menjadi mengancam bagi kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara aliansinya di kawasan Indo-Pasifik.

References

- Al Sarhan, A. S. (2017). United States Foreign Policy and the Middle East. *Open Journal of Political Science*, 7(4), 457-458.
<https://www.scirp.org/journal/paperinforcitation.aspx?paperid=78991>.
- Anugerah, B. (2016). Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 26(Juni), 5-16.
https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_2_6_Juni_2016.pdf
- AP News. (2020). India, US, Japan, Australia resume naval exercises. *Apnews.Com*.
<https://apnews.com/article/australia-india-china-bay-of-bengal-japan-107488c6cc4419396d61328fb5ed8b38>
- Arase, D. (2019). *Trend Southeast Asia: Free and Open Indo-Pacific Strategy Outlook*. Singapore : ISEAS Publishing. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/trends-in-southeast-asia/trends-in-southeast-asia-2019/free-and-open-indopacific-strategy-outlook-by-david-arase/>
- Barry, D., McIntire, M., & Rosenberg, M. (2021, January 09). 'Our President wants Us HERE': The mob that stormed the Capitol. Retrieved July 14, 2021, from <https://www.nytimes.com/2021/01/09/us/capitol-rioters.html>
- BBC. (2021, January 16). A quick guide to the US-China trade war. Retrieved July 16, 2021, from <https://www.bbc.com/news/business-45899310>
- Bush, R. (2016, July 29). The response of China's neighbors to the U.S. "pivot" to Asia. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.brookings.edu/on-the-record/the-response-of-chinas-neighbors-to-the-u-s-pivot-to-asia/>
- Cannon, B. J., & Rossiter, A. (2018). The "Indo-Pacific": Regional Dynamics in the 21st Century's New Geopolitical Center of Gravity. *Rising Powers Quarterly*, 3(2), 7-17. <https://risingpowersproject.com/the-indo-pacific-regional-dynamics-in-the-21st-centurys-new-geopolitical-center-of-gravity-2/>
- Cfr. (2021). Timeline: U.S. relations with CHINA 1949-2021. Retrieved August 18, 2021, from <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>
- China, N. D. (2015). *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*. Beijing.
https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/2015zt/xjpcxbayzlt2015nnh/201503/t20150328_705553.html
- Cropsey, S. (2014, June). *The Rebalance to Asia: What Are Its Security Aims and What Is Required of U.S. Policy?* Retrieved May 01, 2021, from

- https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1411/cropsey_rebalance_to_asia_corrected.pdf.
- CSPAN (Director). (2015, June 16). *Donald Trump presidential campaign Announcement full Speech (C-SPAN)*[Video file]. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=apjNfkysjBM>
- Diaz, D. (2016, October 20). Trump calls Clinton 'a nasty woman'. Retrieved July 14, 2021, from <https://edition.cnn.com/2016/10/19/politics/donald-trump-hillary-clinton-nasty-woman/index.html>.
- Duignan, B. (2021, March 15). Donald Trump: President of the United States. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.britannica.com/biography/Donald-Trump>
- Envall. (2019, September). *The Quadrilateral Security Dialogue: Towards An Indo-Pacific Order?* Retrieved May 03, 2021, from https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2019/09/PR190909_The-Quadrilateral-Security-Dialogue.pdf.
- Fathun, L. M., & Isnarti, R. (2021). *Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ford, L. W. (2020). THE TRUMP ADMINISTRATION AND THE 'FREE AND OPEN INDO-PACIFIC' (Issue May). <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2020/04/trump-media.pdf>
- Fox News. (2015, January 27). Trump endorses romney, cites tough China position and electability. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.foxnews.com/politics/trump-endorses-romney-cites-tough-china-position-and-electability>
- Funaiole, M., & Hart, B. (2021, August 04). Understanding China's 2021 defense budget. Retrieved August 18, 2021, from <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>
- Giles, C. (2020, October 16). US election 2020: Has Trump kept his promises on the military? Retrieved July 15, 2021, from <https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54060026>
- Gillin, J. (2015, August 24). PolitiFact - Bush says Trump was a Democrat longer than a Republican 'in the last decade'. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.politifact.com/factchecks/2015/aug/24/jeb-bush/bush-says-trump-was-democrat-longer-republican-las/>
- Hayes, C. (2018, August 15). Here are 10 TIMES President Trump's comments have been called racist. Retrieved July 14, 2021, from <https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/08/14/time-s-president-trump-comments-called-racist/985438002/>
- He, K., & Li, M. (2020). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US-China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*, 96(1), 1-7. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz242>
- Hunwick, R. F. (2019, January 22). Trump and Xi: A tale of two egos. Retrieved July 16, 2021, from <https://newrepublic.com/article/152923/trump-xi-tale-two-egos>

- Irawan, S. (2018). Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan. *Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 282–310. <https://doi.org/10.33822/mjih.v1i2.434>
- Jain, A. (2016, November 09). 8 qualities of Donald Trump that make him a great leader. Retrieved July 15, 2021, from <https://www.entrepreneur.com/article/284917>
- Kuo, M. A., & Tang, A. O. (2015, 18 May). *The Diplomat*. Retrieved 2020, from U.S. Asia Policy: Past, Present and Future: <https://thediplomat.com/2015/05/u-s-asia-policy-past-present-and-future/>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publications.
- Luthra, G. (2021). The Indo-Pacific Quest for the Quad's Spirit. Retrieved August 5, 2021, from https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2021/07/ORF_IB_Quad-and-Indo-Pacific.pdf
- Mc Bride, J. (2021, February 1). What's next for the trans-pacific partnership (tpp)? Retrieved May 05, 2021, from <https://www.cfr.org/background/what-trans-pacific-partnership-tpp>
- McAdams, D. (2018, January 18). THE MIND OF DONALD TRUMP. Retrieved July 08, 2021, from <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/>
- Montratama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad ke-21. *Intermestic: Journal Of International Studies*, 1(1), 36-61. <https://doi:10.24198/intermestic.v1n1.4>
- Oreskes, M. (1987, September 02). Trump gives a vague hint of candidacy. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.nytimes.com/1987/09/02/nyregion/trump-gives-a-vague-hint-of-candidacy.html>
- Paquin, J. F. (2018). *Foreign Policy Analysis: A Toolbox*. Switzerland: Palgrave MacMillan.
- Pew Research Centre. (2021, March 11). Views of the democratic and Republican parties. Retrieved May 05, 2021, from <https://www.pewresearch.org/politics/2021/03/11/views-of-the-democratic-and-republican-parties/>
- Siniver, A., & Featherstone, C. (2020). Low-Conceptual Complexity and Trump's Foreign Policy. *Global Affairs*, 6(1), 71–85. <https://doi.org/10.1080/23340460.2020.1734953>
- Sotirović, V. (2019). A Nature of The US and The American Foreign Policy. *Vojno Delo*, 71(5), 54–62. <https://doi.org/10.5937/vojdelo1905054s>
- Tacente, T., & Rus, M. (2019). Donald Trump's Social Media Communication or the voice of a man is stronger than the voice of an institution. *Technium Social Sciences Journal*, 1. Retrieved 2021, from https://www.researchgate.net/publication/338541131_Donald_Trump%27s_Social_Media_Communication_or_the_voice_of_a_man_is_stronger_than_the_voice_of_an_institution.
- Tertia, J., & Perwita, A. A. B. (2018). Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 77–95. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95>

- Wardhana, A., & Dugis, V. M. A. (2019). Grand Strategy Isolasionisme Selektif : Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump. *Global Strategis*, 13(2), 141–156. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.141-156>
- Wyeth, G. (2017, November 16). Why has AUSTRALIA shifted back to THE QUAD? Retrieved May 01, 2021, from <https://thediplomat.com/2017/11/why-has-australia-shifted-back-to-the-quad/>